

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Alfitra, S. H., Faizin, M. H. A., & Mansur, M. A. A. (2021). *MODUS OPERANDI PROSITUSI ONLINE DAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA*. BuatBuku. com.
- Any Suryani H. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Sanabil.
- Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, & Zuhairah Ariff Abd Ghadas. (2021). *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi : Berbasis Kebutuhan* .
- Henny Nuraeny. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. RajaGrafindo.
- Hijrah Lahaling, S. H. I. (2021). *Pemenuhan hak-hak anak pekerja migran Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia*. Deepublish.
- Justitia Avila Veda, dkk. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. International Organization for Migration (IOM) Indonesia. <https://indonesia.iom.int/>
- Manek, Y., Arjaya, I. M., & Styawati, N. K. A. (2023a). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.
- Manek, Y., Arjaya, I. M., & Styawati, N. K. A. (2023b). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Muhammad Kamal. (2019). *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. SocialPoliticGenius.
- Noveria, M., & Fitranita, U. (2020). *Perlindungan pekerja migran Indonesia: kesepakatan dan implementasinya*. In *(No Title)*.
- Oktavionita, F., & Riyadh, A. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 16. <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764>
- Paul Sinlaeloe. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. SetaraPress.

- Saimima, I. D. S. (2020). *Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang*. Deepublish.
- SinlaEloE, P. (2024). *Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit Andi.
- Sunggara, M. A., SH, M. H., Kn, M., Imanuddin, M., SH, M. H., & Rocky Marbun, S. H. (2023). *Penemuan dan penafsiran hukum*. Publica Indonesia.
- Sutra, H., & Hadi, S. (2023). *Pekerja Migran Indonesia Non Presedural (Kajian Hukum)-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Wibowo, A. P. S., Fransiska, A., Nugroho, F. H. E., & Adipradana, N. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

B. Sumber Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 6842. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran RI Nomor 4720. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran RI Nomor 6141. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran RI Nomor 5341. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 263. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia. *Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*. Jakarta.

C. Sumber lainnya

- Afifah, F., Sulastri, L., & Zainab, N. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(3).
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181–194.
- Faradila, F., Ainuddin, A., & Makhrip, A. G. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid. sus/2022/Pn. mks. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1).
- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*. *Jurnal Legisla*, 15(2), 136–145. Justitia Avila Veda, dkk. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. <https://indonesia.iom.int/>
- Nola, L. F. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 35–52.
- Oktavionita, F., & Riyadh, A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 16. <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764>
- Rahman, M. A. Y. U. (2019). "Pengaturan Restitusi Kepada Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak.”

- Tantri, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 10(3).
- CahyaSupena, C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 427–435.
- Damanik, A. P., Asikin, Z., & Rodliyah, R. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Luar Negeri (Putusan Nomor 85/pid.sus/2-21/pn. sel). *Jurnal Education and Development*, 11(2), 450–456.
- Soraya, A., Purwanda. S & Taufik. M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang menjadi Korban Perdagangan Orang. *Jurnal Dinamika Hukum Vol 24 No. 2 Oktober 2023*.